



# Analisis Efektivitas Bantuan Sosial (Bansos) dalam mengatasi Kemiskinan di Indonesia

Nanda Salsabila<sup>1\*</sup>, Nilna Muna<sup>2</sup>, Vikko Hilmi Pradana<sup>3</sup>, Wirawan Firman Nurcahya<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup> Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

\*Correspondence: Nanda Salsabila  
Email: [nandaslsbl06@gmail.com](mailto:nandaslsbl06@gmail.com)

Received: 30 May 2024  
Accepted: 06 June 2024  
Published: 13 June 2024



**Copyright:** © 2024 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

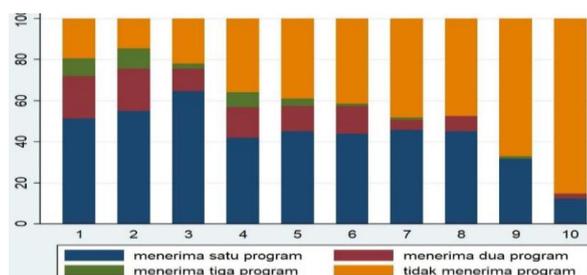
**Abstract:** This study aims to analyze the effectiveness of the influence of social assistance in overcoming poverty in Indonesia. The poverty rate in Indonesia has reached an alarming number so that the government has issued various social assistance to ease the burden on the poor, but in reality, many distributions of social assistance are not on target. The method used in this study is a library study with secondary data obtained from various sources including literature, research reports, and official government documents relevant to this topic. The results of this study indicate that social assistance issued by the government is less effective in eradicating poverty in Indonesia, but the government needs to continue the social assistance program so that it can help the burden of poor families and reduce the number of poor people in Indonesia. Of the various social assistance issued by the government, the Family Hope Program (PKH) is one of the social assistance programs that is considered effective in helping to realize community welfare. The main obstacles that make the achievement of this social assistance less than optimal are inaccurate data on prospective recipients, political interests that target the poor, and limited evaluation. The distribution of social assistance needs to be improved, a more comprehensive program is needed, as well as structured synergy and coordination between all officers and stakeholders so that social assistance can help the poor people who should be the target in order to be able to free the poor from poverty.

**Keywords:** Effectiveness, Social Assistance, Poverty, PKH

## Pendahuluan

Pemerintah Indonesia terus berupaya untuk menurunkan tingkat kemiskinan di Indonesia salah satunya dengan meluncurkan Program Bantuan Sosial (BANSOS). Adapun jenis Program Bantuan Sosial yang diadakan pemerintah yaitu Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Sosial Tunai, Rasta, dan PIP. Program ini mendapatkan berbagai tanggapan pro kontra dari masyarakat hingga sempat memunculkan polemik mengenai ketidakmerataan bansos dalam pendataan yang salah sasaran. Ketua Ombudsman Nasional RI mengatakan bahwa laporan yang masuk ke Posko Ombudsman pada 2020 terdapat 817 pengaduan mengenai bantuan sosial dari total 1.004 laporan yang masuk. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dirasa tidak akurat dalam

mendata para masyarakat yang membutuhkan bantuan. Banyak masyarakat yang kurang mampu tidak mengetahui cara mendaftarkan diri di DTKS karena kurangnya sosialisasi dari pemerintah, hal ini menyebabkan banyak masyarakat yang berhak malah tidak mendapatkan bansos. Ketidakakuratan data bansos juga membuat bantuan sosial menjadi tumpang tindih karena beberapa masyarakat mendapatkan lebih dari satu bantuan yang mengakibatkan inefisiensi dan boros anggaran. Proses pendataan dan penyaluran seringkali dirasa kurang transparansi yang menimbulkan keraguan serta kecurigaan dikalangan masyarakat tentang program bantuan sosial ini.



Sumber: Pengolahan Data Susenas (2019)

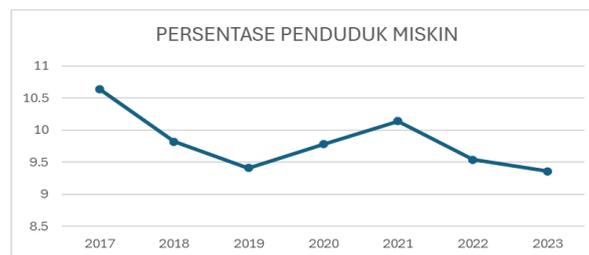
**Gambar 1.** Grafik Persentase Penerima Bantuan Sosial Per Desil

Pada Gambar 1, dapat dilihat bahwa masyarakat desil 1 yaitu kelompok termiskin ditandai dengan warna orange sekitar 20% belum mendapatkan program bantuan sosial, sementara di desil 10 yaitu kelompok terkaya ditandai dengan warna merah mendapatkan bahkan lebih dari satu bantuan sosial. Permasalahan penyaluran bantuan sosial yang tidak tepat ini dapat memberikan rasa ketergantungan bagi penerimanya. Karena yang seharusnya dana tersebut diterima oleh penduduk miskin, karena penyaluran yang tidak tepat menyebabkan penyalahgunaan dana bantuan sosial oleh penduduk yang tidak seharusnya menerima dana tersebut. Sehingga muncul ketergantungan dari penduduk yang tidak seharusnya menerima bantuan tersebut dan menyebabkan anggaran realisasi bantuan sosial menjadi tidak maksimal dalam menekan angka kemiskinan di Indonesia. Pemerintah telah melakukan perbaikan mengenai data DTKS supaya lebih akurat pada tahun 2021 dengan mendata ulang para penerima dan calon penerima bantuan, petugas pendataan juga melakukan verifikasi dan survei data secara langsung dari rumah ke rumah untuk mengetahui kelayakan penerima bantuan. Sehingga dengan adanya program ini diharapkan dapat membantu kehidupan masyarakat Indonesia yang mengalami kekurangan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya (Puspita dan Rifai, 2021). Program bantuan sosial yang diluncurkan oleh pemerintah ini tentunya memberikan pengaruh positif bagi masyarakat. Menurut BPS pada tahun 2021 tingkat kemiskinan di Indonesia sebesar 10,19% dan pada tahun 2022 sebesar 9,71%, hal tersebut menunjukkan telah terjadi penurunan tingkat kemiskinan.



Sumber: Databoks (2013-2023)

**Gambar 2.** Grafik Realisasi Anggaran Bansos



Sumber: Badan Pusat Statistik (2017-2023)

**Gambar 3.** Grafik Persentase Penduduk Miskin

Berdasarkan Gambar 2, Realisasi anggaran pemerintah dalam program bantuan sosial pada tahun 2020 anggaran bantuan sosial meningkat drastis karena Indonesia terdampak oleh pandemi Covid-19, sehingga jumlah penerima bantuan sosial dari pemerintah juga ikut meningkat akibat kondisi tersebut. Berdasarkan Gambar 3, data persentase kemiskinan yang didapat dari BPS, persentase penduduk miskin di Indonesia cukup berfluktuasi karena sangat rentan dipengaruhi oleh berbagai peristiwa baik dari dalam maupun luar negeri, seperti pandemi Covid dan perang negara lain. Namun pemerintah dapat dikatakan berhasil dalam menurunkan tingkat kemiskinan pasca pandemi, yang dapat dilihat pada bulan Maret 2022 persentase jumlah penduduk miskin di Indonesia sudah mencapai 9,36%. Jumlah tersebut mengalami pengurangan dari tahun sebelumnya yang mencapai 9,54%. Persentase kemiskinan di Indonesia ini sejalan dengan banyaknya bantuan sosial yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Permasalahan mengenai pendistribusian bantuan sosial perlu terus dibenahi karena program bantuan sosial digadangkan dapat berkontribusi kuat dalam menurunkan jumlah kemiskinan di Indonesia dengan terus mengadakan evaluasi agar tidak ada penyalahgunaan bantuan sosial oleh oknum tertentu. Pemberian bantuan sosial yang tidak tepat sasaran dapat menyebabkan rasa ketergantungan masyarakat terhadap bantuan yang diberikan, padahal bantuan sosial ini menjadi wujud ketahanan ekonomi bagi rumah tangga miskin dalam menghadapi segala bentuk guncangan. Bantuan sosial ini tidak hanya bertujuan untuk memberantas kemiskinan seperti yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 15 tahun 2010, namun juga sebagai program perlindungan dalam upaya meminimalisir kerentanan ekonomi keluarga miskin. Pemberian bantuan sosial yang dapat membantu meningkatkan daya beli masyarakat jika tidak diimbangi dengan penyaluran

dan pengendalian yang tepat dapat memperkeruh perekonomian di Indonesia. Bantuan sosial dapat ditransformasi secara optimal dengan menjadikannya sebuah program pelatihan agar masyarakat tidak hanya mendapat bantuan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya tetapi juga mendapat pengetahuan dan kemampuan baru untuk melanjutkan hidupnya, sehingga masyarakat dapat lebih berkembang sekaligus mengurangi tingkat ketergantungan masyarakat terhadap bantuan sosial yang ada.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas bantuan sosial (BANSOS) dalam mengatasi kemiskinan di Indonesia dengan memperhatikan penyaluran dana bantuan sosial kepada pihak yang tepat sasaran dan melakukan sinkronisasi antara pengeluaran dana bantuan sosial yang diberikan pemerintah dengan jumlah angka kemiskinan masyarakat yang berada di Indonesia. Hal ini ditujukan untuk melihat efektivitas bantuan sosial untuk mengatasi kemiskinan dibanding dengan kebijakan pemerintah lainnya seperti pertumbuhan ekonomi dan pembukaan lapangan kerja. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah terkait kondisi yang efektif bagi penyaluran dana bantuan sosial.

## Kajian Pustaka

### Efektivitas

Efektivitas dalam KBBI bermakna sebuah kesesuaian antara rencana yang telah dibuat dan juga tujuan yang akan dicapai dari rencana tersebut, Menurut Mardiasmo (2017) efektivitas merupakan sebuah ukuran dari suatu rencana yang dibuat dalam suatu organisasi dengan mengukur dari capaian tujuan yang telah direncanakan berjalan dengan sesuai. Hal tersebut sesuai dengan pengertian efektivitas Beni (2016: 69) Efektivitas hubungan antara rencana dengan tujuan yang dapat diukur seberapa besar rencana yang dibuat dengan kebijakan yang diterapkan. Efektivitas daripada suatu rencana dapat ditentukan dari berbagai macam faktor. Ketika suatu rencana dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang ditentukan, maka hal tersebut dapat dikatakan rencana yang digunakan efektif. Begitu juga sebaliknya apabila rencana yang dibuat tidak sesuai dengan tujuan yang ditentukan, maka hal tersebut dapat dikatakan tidak efektif maka dapat diartikan bahwa hal tersebut belum mencapai tingkat efektivitas yang diharapkan. Hal yang dinilai paling negatif adalah efisien tetapi tidak efektif yang artinya terdapat pemborosan sumber daya namun tidak mencapai sasaran. Tiga kriteria utama diperlukan untuk mengevaluasi keberhasilan suatu program:

1. Pencapaian Tujuan: upaya untuk mencapai tujuan program harus dipandang sebagai proses yang berkelanjutan. Dua faktor penting dalam hal ini adalah waktu dan tujuan yang terukur.
2. Integritas: standar ini menilai kemampuan organisasi dalam menyebarkan informasi tentang program dan memberikan konsekuensi bagi pelanggarnya. Integrasi berfokus pada proses sosialisasi program.
3. Kemampuan beradaptasi: standar ini menilai kemampuan organisasi untuk beradaptasi dengan lingkungannya. Hal ini berarti menilai kesesuaian program

dalam konteksnya.

### **Bantuan Sosial (BANSOS)**

Bantuan Sosial merupakan program pemerintah yang diatur secara langsung dalam Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 01 Tahun 2019 tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial tercantum pada pasal 1 ayat 1 bahwa Bantuan Sosial merupakan “bantuan berupa uang, barang atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok, masyarakat miskin, tidak mampu dan atau rentan terhadap resiko sosial”. Sehingga program Bantuan Sosial ini bertujuan secara langsung untuk memberikan bantuan pada kelompok masyarakat tertentu seperti dalam kondisi memiliki resiko sosial guna mempermudah perekonomiannya atau mengembangkan potensi yang dimiliki kelompok masyarakat tersebut dengan diberikan Bantuan Sosial berupa uang tunai maupun berupa bantuan non tunai. Pemerintah yang memiliki tujuan untuk mengurangi pengangguran dan kemiskinan agar pertumbuhan ekonomi dapat terus meningkat menetapkan 3 (tiga) jalur strategi pembangunan, yaitu Pro-Pertumbuhan (Pro-Growth) yang bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi melalui investasi dengan meningkatkan kualitas pengeluaran pemerintah dan meningkatkan kualitas konsumsi, Pro-Lapangan Kerja (Pro-Job) yang bertujuan untuk menciptakan lapangan pekerjaan agar pengangguran dapat menurun sehingga pertumbuhan ekonomi semakin meningkat, serta Pro-Masyarakat Miskin (Pro-Poor) yang bertujuan untuk mengurangi jumlah kemiskinan di masyarakat dengan menyempurnakan sistem perlindungan sosial, meningkatkan pelayanan dasar, dan menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat. Instrumen utama yang difokuskan oleh pemerintah dalam strategi pro-poor untuk menanggulangi kemiskinan dibagi menjadi 3 (tiga) klaster, dengan Klaster I yang berfokus pada bantuan sosial terpadu berbasis keluarga, Klaster II yang berfokus pada penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat, serta Klaster III yang berbasis pada pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil atau UMKM. Jenis bantuan sosial tersebut akan diberikan berdasarkan data kelompok masyarakat yang diterima oleh pemerintah, sehingga jenis bantuan sosial yang diberikan dapat sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh kelompok masyarakat tersebut. Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Pasal 5 Nomor 01 Tahun 2019, pemberian bantuan sosial merupakan suatu upaya untuk meringankan penderitaan, melindungi kondisi fisik dan juga sebagai sarana memberdayakan potensi seseorang. Selain untuk membantu kelompok masyarakat yang tergolong miskin, bantuan sosial ini juga diberikan bagi masyarakat yang dianggap memiliki potensi dan ingin mengembangkan potensinya tersebut untuk mencapai kesejahteraan. Dengan ini bantuan sosial tidak hanya diberikan pada masyarakat yang memiliki resiko sosial tetapi juga diberikan bagi masyarakat yang memiliki potensi dan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

### **Kemiskinan**

Kemiskinan merupakan permasalahan utama dalam ekonomi yang bersifat multidimensional sehingga harus diberantas dengan serius agar tidak menghambat pertumbuhan ekonomi suatu bangsa. Ragnar Nurkse (1952), yang dikenal dengan teorinya

tentang lingkaran setan kemiskinan yang terdapat didalam bukunya yang berjudul "Some Aspects of Capital Accumulation in Underdeveloped Countries". Buku tersebut terbit pada tahun 1952, dalam buku tersebut disebutkan bahwa ada sebuah satu lingkaran kemiskinan yang menyebabkan saling mempengaruhi antara berbagai faktor yang memberikan dampak pada negara akan terus dalam lingkaran kemiskinan. Nurkse mengemukakan bahwa kemiskinan terjadi dikarenakan adanya perbedaan kualitas SDM dalam suatu negara dengan ditantai dari tingkat IPM yang rendah, pasar tidak sempurna dan modal yang minim. Sehingga berdampak pada tingkat produktivitas negara menjadi rendah. Dengan tingkat produktivitas yang rendah akan berdampak juga pada penurunan pendapatan masyarakat sehingga akan berkaitan juga dengan konsumsi, tabungan dan juga investasi masyarakat dikarenakan masyarakat memiliki tingkat pendapatan yang rendah sehingga akan sulit untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. (Kuncoro, 1997). Permasalahan kemiskinan ini cukup pelik dan harus secepatnya diatasi. Pemerintah telah mengusahakan berbagai cara untuk mengurangi kemiskinan ini, salah satunya adalah dengan bantuan sosial.

### **Metode Penelitian**

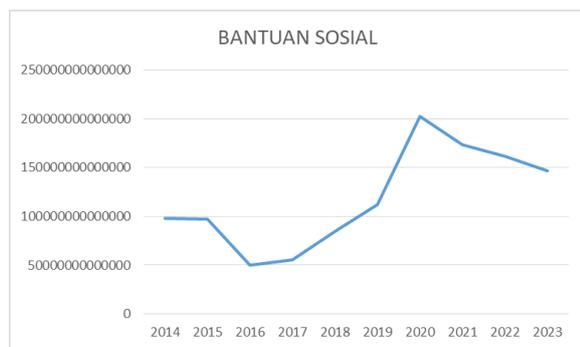
Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka, pengumpulan data diperoleh dengan memahami dan mempelajari berbagai teori dari literatur yang relevan dengan topik penelitian. Peneliti mengumpulkan informasi dengan membaca dan menganalisis buku, jurnal ilmiah, artikel, dan sumber tertulis lainnya yang membahas tentang bantuan sosial dalam menangani kemiskinan untuk membangun landasan teoritis dan konseptual penelitian, penelitian ini menggunakan jenis sumber data sekunder dengan sumber data pendukung seperti jurnal ilmiah, buku, laporan penelitian, dokumen resmi pemerintah (kementerian keuangan, kementerian sosial dan BPS) dan sumber pendukung lainnya yang dapat menunjang dan relevan dengan penelitian serta memiliki kredibilitas pengecekan sumber. Menurut Zed (2004) terdapat empat tahap studi pustaka dalam penelitian yaitu persiapan perlengkapan, penyusunan bibliografi, pengorganisasian waktu, membaca dan mencatat bahan penelitian. Penelitian menggunakan teknik model analisis Miles dan Huberman dengan teknik reduksi data, display data dan conclusions

### **Hasil dan Pembahasan**

#### **Efektivitas Bantuan Sosial dalam Menanggulangi Kemiskinan**

Indonesia yang sedang berada dalam masa pertumbuhan ekonomi banyak mengeluarkan kebijakan yang pro akan pertumbuhan ekonomi, namun kebijakan-kebijakan tersebut belum mampu menjawab tantangan dalam menurunkan jumlah penduduk miskin di Indonesia. Masyarakat miskin yang diindikasikan akan sulit untuk keluar dari kemiskinan dengan upayanya bekerja sendiri akibat adanya risiko ketidakpastian pendapatan dan keadaan, akan lebih baik jika masyarakat miskin menerima bantuan untuk meningkatkan kelayakan hidupnya. Salah satu kunci untuk memberantas kemiskinan adalah dengan mengefektifkan penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat

yang membutuhkan. Bantuan sosial yang berupa BLT, BPNT, PIP, PKH, dan bentuk lainnya merupakan bantuan yang bersifat pro-poor spending yang bersifat progresif absolut, yaitu pengeluaran yang memihak dan dikhususkan untuk masyarakat miskin. Bantuan sosial yang diberikan pada masyarakat ini akan sangat bermanfaat bagi para penerima karena dana maupun bantuan lain tersebut dapat digunakan dan dikelola sendiri untuk kebutuhan keluarga maupun kebutuhan penunjang usaha bagi masyarakat. Namun pada kenyataannya masih banyak bantuan sosial yang salah sasaran dalam penyalurannya di mana banyak keluarga yang tidak mampu tetapi tidak mendapatkan bantuan dan ada keluarga mampu yang malah mendapatkan program bantuan dari pemerintah. Banyak ditemukan masyarakat miskin yang belum merasakan manfaat dari bantuan sosial pemerintah akibat dari ketidaktepatan penyaluran tersebut. Perlu dilakukan pendataan dan pemantauan lebih lanjut mengenai penerima bantuan sosial agar masyarakat miskin lainnya dapat terbantu dengan program pemerintah ini.



Sumber: Badan Pusat Statistik (2014-2023)

**Gambar 4.** Grafik Dana Bantuan Sosial

**Gambar 5.** Grafik Jumlah Penduduk Miskin

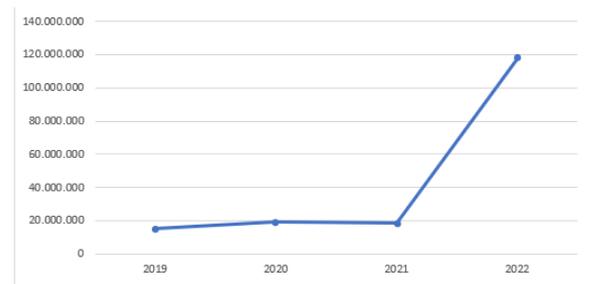
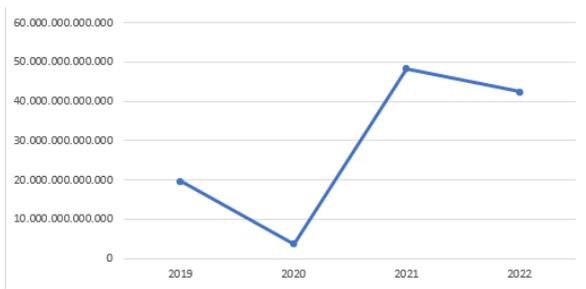
Berdasarkan Gambar 4, data bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah dan jumlah penduduk miskin di Indonesia sejak tahun 2014 hingga tahun 2023, kedua data tersebut berfluktuatif. Data bantuan sosial dalam 10 tahun terakhir sering mengalami kenaikan terutama saat tahun politik dan saat adanya pandemi, sedangkan pada Gambar 5, jumlah penduduk miskin di Indonesia mengalami tren menurun kecuali pada masa pandemi Covid-19. Kedua data tersebut menunjukkan data berbanding terbalik di beberapa tahun yang berarti saat bantuan sosial yang dikeluarkan pemerintah meningkat, jumlah penduduk miskin mengalami penurunan. Namun terdapat pengecualian pada masa pandemi Covid-19 di mana semua masyarakat mengalami kemerosotan dalam perekonomiannya meskipun bantuan sosial yang dikeluarkan pemerintah melonjak dengan pesat, serta masih terdapat banyak tahun dengan data yang bergerak beriringan yang berarti bantuan sosial belum terlalu efektif dalam mengatasi kemiskinan, terlebih lagi pada pasca-pandemi yang mengindikasikan bahwa program pemerintah ini belum bisa menanggulangi dampak Covid-19 di Indonesia.

Hal ini menunjukkan bahwa bantuan sosial yang diberikan pemerintah masih belum sepenuhnya efektif dan bantuan sosial ini tidak semata-mata langsung mempengaruhi penurunan jumlah penduduk miskin karena terdapat beberapa faktor yang harus diubah

seperti penetapan sasaran penerima bantuan sosial yang buruk, tergerusnya manfaat dari esensi bantuan sosial itu sendiri, birokrasi rumit yang menghambat alur penerimaan bantuan sosial, serta ketergantungan masyarakat miskin akan bantuan ini sehingga hanya dapat memberikan solusi jangka pendek untuk kemiskinan. Program bantuan sosial ini akan menjadi efektif dalam membantu mengurangi kemiskinan di Indonesia jika tepat sasaran dan tidak ditumpangi oleh kepentingan politik. Perlu program yang lebih komprehensif serta sinergi dan koordinasi yang terstruktur antar seluruh petugas dan pemangku kepentingan supaya bantuan sosial dapat membantu masyarakat miskin yang tepat yang seharusnya menjadi target agar mampu melepaskan masyarakat miskin dari kemiskinan.

### **Program Bantuan Sosial yang Efektif**

Perserikatan Bangsa - Bangsa (PBB) pada tahun 2005 menyatakan situasi sosial dunia, bahwa program bantuan tunai langsung dinilai dapat mendorong keluarga paling miskin untuk memperoleh kesempatan merubah nasib perekonomian mereka menjadi lebih baik dan menghentikan kemiskinan lintas generasi. Program bantuan sosial yang dinilai berdampak dalam mengurangi angka kemiskinan dan ketimpangan menurut Kementerian Keuangan yakni Program Keluarga Harapan (PKH) yang mulai beroperasi pada tahun 2007, kemudian diiringi oleh program bantuan sosial lainnya seperti BPNT, PIP dan KUBE. Program KUBE berpengaruh terhadap partisipasi angkatan kerja namun sangat kecil dampak yang diberikan untuk mengatasi program kemiskinan sedangkan program BPNT memiliki kesamaan dengan PKH bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan akan tetapi tidak bersifat jangka panjang karena berfokus untuk memenuhi kebutuhan saat ini, Menurut penelitian Yusrita Florentina pada tahun 2020 mengemukakan bahwa PKH telah meningkatkan pengeluaran konsumsi rumah tangga penerima manfaat sebesar 16% dan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) memberikan bantuan kepada masyarakat bukan penerima PKH sedangkan PKH memfokuskan pemberian bantuan kepada masyarakat yang memerlukan pendidikan serta kesehatan. Program PKH dikatakan paling berdampak terhadap kemiskinan dan ketimpangan dikarenakan mayoritas penerima merupakan kategori keluarga desil 1 hingga desil 4 dan pemberian bantuan dalam bentuk tunai sehingga para penerima leluasa menggunakan bantuan tersebut untuk kebutuhannya masing - masing. PKH diadaptasi oleh program yang telah dilaksanakan di berbagai negara khususnya negara Amerika Latin dan Karibia dengan sebutan Conditional Cash Transfer (CCT) atau kata lain bantuan sosial bersyarat. Program ini diadakan sebagai upaya untuk membangun sistem perlindungan sosial bagi para masyarakat miskin (Modul Diklat PKH 2013). Menurut Rawlings Bantuan tunai bersyarat merupakan indikator dari program pembangunan generasi baru guna meningkatkan modal manusia. Memutus siklus lingkaran kemiskinan yang terjadi antar generasi khususnya diawali dengan generasi muda, CCT dalam jangka pendek berguna untuk memajukan akses pelayanan publik dan mengurangi angka kemiskinan, sedangkan dalam jangka panjang dapat menjadi sumber investasi human capital. Hal ini dapat menjadi sebagai pendukung kelompok anak usia sekolah dalam mencapai kualitas hidup yang lebih baik dimasa mendatang.



Sumber: Badan Pusat Statistik (2022)

**Gambar 6.** Grafik Anggaran Bantuan Sosial

**Gambar 7.** Grafik Keluarga Penerima Bantuan Sosial

Berdasarkan Gambar 6, terlihat bahwa anggaran Bantuan Sosial (Bansos) di Indonesia mengalami peningkatan secara konsisten dari tahun 2019 hingga tahun 2022. Peningkatan ini paling signifikan terjadi pada tahun 2021, dimana anggaran Bansos meningkat sebesar 50% dibandingkan tahun 2020. Gambar 7, peningkatan anggaran Bantuan Sosial Jumlah keluarga penerima bantuan sosial di Indonesia juga meningkat. Peningkatan ini paling signifikan terjadi pada tahun 2020, dimana jumlah keluarga penerima bantuan sosial meningkat sebesar 30% dibandingkan tahun 2019. Peningkatan anggaran dan jumlah keluarga penerima bantuan sosial ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti pandemi COVID-19, menyebabkan banyak orang kehilangan pekerjaan dan mata pencaharian, sehingga mereka membutuhkan bantuan sosial dari pemerintah dan pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk meningkatkan jumlah dan cakupan bantuan sosial, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan program bantuan sosial lainnya.

**Tabel 1.** Penerima PKH dan BLT

Tahun	Jumlah Penerima PKH	Jumlah Penerima BLT
2019	10.3 juta	-
2020	10.7 juta	9 juta
2021	10.5 juta	20.6 juta
2022	10 juta	-

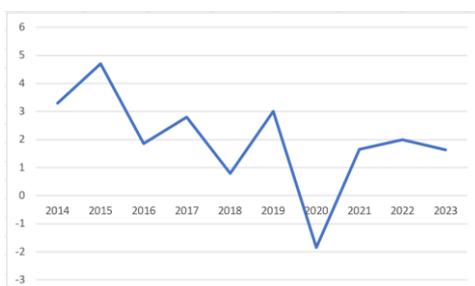
Sumber: Kementerian Sosial (2022)

Keterbatasan anggaran dalam menjalankan program bantuan sosial sehingga pada tahun 2019 fokus utama pemerintah dalam menangani kemiskinan melalui Program Keluarga Harapan (PKH). Penerima PKH jumlahnya relatif stabil dari tahun 2019 hingga 2022, Program BLT diluncurkan pemerintah pada tahun 2020 sebagai respons terhadap dampak COVID 19 dan jumlah BLT mengalami peningkatan signifikan di tahun 2020 hingga 2021 namun pada tahun 2022 program BLT telah dihentikan dan pemerintah kembali fokus pada program sosial lain seperti PKH. Sejak diluncurkan pada tahun 2007, program Keluarga Harapan (PKH) telah menunjukkan dampak positif yang signifikan dalam menurunkan angka kemiskinan di Indonesia. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan angka kemiskinan terus menurun sejak penerapan PKH. Pada tahun 2007,

angka kemiskinan di Indonesia mencapai 10,86%. Pada tahun 2020, angka tersebut berhasil diturunkan menjadi 9,78%. Keberhasilan PKH dalam pengentasan kemiskinan juga diakui oleh Bank Dunia. Berdasarkan riset Bank Dunia, program PKH telah membantu 2,5 juta orang keluar dari kemiskinan pada tahun 2011 hingga 2015. Selain mengurangi kemiskinan, program PKH juga terbukti meningkatkan akses layanan kesehatan dan pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin. Data Kementerian Sosial tahun 2021 menunjukkan 84% anak usia 7 hingga 18 tahun dari keluarga PKH bersekolah. Selain itu, 90% ibu hamil dan menyusui dari keluarga PKH menjalani pemeriksaan di fasilitas kesehatan. Program ini tidak hanya membantu mereka keluar dari perangkap kemiskinan, namun juga meningkatkan kualitas hidup mereka dengan meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan.

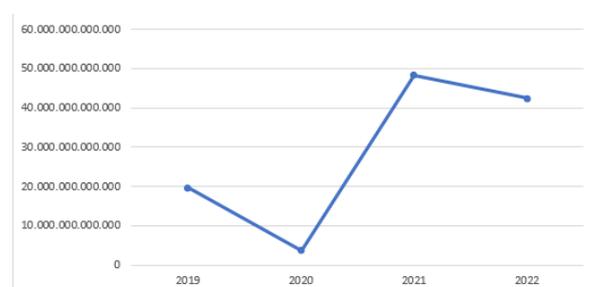
### Pengaruh Bantuan Sosial Terhadap Perekonomian

Program bantuan sosial yang dibuat oleh pemerintah tentunya dibuat tidak hanya untuk menanggulangi kemiskinan yang ada di Indonesia. Program bantuan sosial ini juga diharapkan dapat memperbaiki perekonomian penduduk penerima bantuan sosial di masa mendatang. Dengan adanya bantuan sosial seperti BLT, BPNT, PIP, PKH akan membantukan perekonomian penduduk miskin dan memberikan kemungkinan bagi penerima bantuan sosial tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya tetapi juga dapat menjadi sarana untuk usaha penerima bantuan sosial. Apabila bantuan sosial yang diberikan pemerintah digunakan sebagaimana mestinya oleh penduduk penerima bantuan sosial, maka akan berdampak juga terhadap perekonomian yang ada dikarenakan masyarakat akan lebih mudah dalam mencukupi kebutuhan hidupnya. Seperti yang tertulis dalam peraturan Menteri Keuangan Nomor 181 Tahun 2012, bahwa bantuan sosial merupakan bentuk transfer uang, barang ataupun jasa yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat guna melindungi dari adanya resiko sosial, meningkatkan kemampuan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan peraturan tersebut juga disebutkan bahwa bantuan sosial yang ada salah satunya bertujuan untuk meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat.



Sumber: Badan Pusat Statistik (2014-2023)

**Gambar 8.** Grafik PDB Indonesia



**Gambar 9.** Grafik Anggaran Bantuan Sosial

Apabila dilihat dari Gambar 8, tingkat PDB yang didapatkan dari web resmi BPS, pada tahun 2020 merupakan puncak terbesar penyaluran bantuan sosial diberikan pada

penduduk penerima bantuan sosial. Hal tersebut terjadi dikarenakan adanya pandemi Covid-19 yang menyebabkan tingkat perekonomian di Indonesia menurun drastis hingga -1.84 pada tahun 2020. Walaupun peningkatan PDB pada tahun 2021 tidak sepenuhnya dipengaruhi oleh adanya kebijakan bantuan sosial yang diberikan pemerintah, tetapi dengan adanya bantuan sosial ini tentunya cukup membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya pada masa pandemi Covid-19. Seperti yang dapat kita lihat pada masa Pandemi Covid-19 segala macam kegiatan ekonomi di luar rumah dibatasi oleh pemerintah untuk menekan angka penyebaran pandemi Covid-19. Dengan adanya bantuan sosial, yang sebelumnya hanya membantu pihak-pihak tertentu menjadi lebih banyak pihak yang membutuhkan dikarenakan kondisi tersebut. Sehingga pada tahun 2021 dan seterusnya perekonomian di Indonesia kembali pulih dikarenakan salah satu faktor pendorongnya adalah bantuan sosial yang diadakan pemerintah.

### **Kesimpulan**

Pemerintah perlu melanjutkan program bantuan sosial untuk mengentaskan kemiskinan, dengan perbaikan menyeluruh terhadap sistem yang ada saat ini. Program Keluarga Harapan (PKH) dinilai cukup efektif dalam mengatasi kemiskinan dibanding program bantuan sosial lain. Namun perluasan cakupan dan pengendalian penyaluran program bantuan sosial yang ada, khususnya bagi rumah tangga miskin dan rentan yang belum tersentuh bantuan, merupakan langkah krusial. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan adanya peningkatan penerima bantuan sosial pada tahun 2019 hingga tahun 2022 diiringi dengan penurunan angka kemiskinan pada tahun 2021 hingga tahun 2023. Hal ini memperkuat rekomendasi untuk memperkuat mekanisme pemantauan dan pendataan penerima agar program ini tepat sasaran dan efektif dalam mencapai tujuan pengentasan kemiskinan. Penyaluran bantuan sosial memerlukan perhatian khusus untuk menjamin keakuratan penerima dan meminimalisir penyelewengan dana oleh oknum tertentu. Pendekatan yang lebih terintegrasi dan transparan dalam pengelolaan bantuan sosial diharapkan dapat memberikan dampak yang lebih signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat miskin di Indonesia. Pendistribusian bantuan sosial perlu dibenahi, diperlukan program yang lebih komprehensif, serta sinergi dan koordinasi yang terstruktur antar seluruh petugas dan pemangku kepentingan supaya bantuan sosial dapat membantu masyarakat miskin yang tepat yang seharusnya menjadi target agar mampu melepaskan masyarakat miskin dari kemiskinan. Maka, pada permasalahan tersebut sebaiknya pemerintah terutama pemerintah yang ada di daerah untuk melakukan pendataan penduduk sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan sebagai penerima bantuan sosial dan bagi pemerintah yang ada di daerah apabila melakukan tindakan mementingkan kepentingan pihak tertentu diperlukan adanya hukum yang tegas.

## Daftar Pustaka

- Alam, A. Z. I., Zaid, M., & Alam, A. A. F. (2023). Digitalisasi Sistem Perlindungan Sosial Kebijakan di Indonesia sebagai Langkah Menuju Masyarakat 5.0. *Journal Social Society*, 3(2), 95-112.
- Fadhli, K., & Nazila, L. R. (2023). Pengaruh Implementasi Bantuan Sosial Bpnt Dan Pkh Terhadap Efektivitas Penanggulangan Kemiskinan. *Jurnal Education and development*, 11(2), 196-202.
- Florentin, Y. (2021). ANALISIS PERBANDINGAN PROGRAM KBANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DENGAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DALAM MENSEJAHTERAKAN MASYARAKAT DI RW 001 KECAMATAN JATISAMPURNA. *PANDITA: Interdisciplinary Journal of Public Affairs*, 4(1), 1-11.
- Kementerian Sosial Republik Indonesia. Retrieved June 5, 2024, from <https://kemensos.go.id/>
- Kusnasari, S., Azlan, A., & Tarigan, B. E. B. T. B. (2021). Klasifikasi Masyarakat Miskin Layak Menerima Bantuan Sosial. *Jurnal SAINTIKOM (Jurnal Sains Manajemen Informatika dan Komputer)*, 20(2), 167-173.
- Menteri Sosial Republik Indonesia. (2019). Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia. 2-18.
- Muhammad, L. (2019). Efektivitas Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga. *Jurnal COMM-EDU*, 81-89.
- Noerkaisar, N. (2021). Efektivitas Penyaluran Bantuan Sosial Pemerintah untuk Mengatasi Dampak Covid-19 di Indonesia. *Jurnal Manajemen Perbendaharaan*, 2(1), 83-104. <https://doi.org/https://doi.org/10.33105/jmp.v2i1.363>
- Persentase Penduduk Miskin (P0) Menurut Provinsi dan Daerah - Tabel Statistik. Badan Pusat Statistik. Retrieved June 5, 2024, from <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTkyIzI=/persentase-penduduk-miskin--maret-2023.html>
- Piliang, M. Z. (2023). KEMISKINAN, KESENJANGAN PENDAPATAN, DAN BANTUAN SOSIAL. *At-Tanmiyah: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 2(2), 262-284.
- Putri, N. A., & Purnaweni, H. (2021). Implementasi Program Keluarga Harapan (Pkh) Dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan Di Kecamatan Bojonegoro. *Journal of Public Policy and Management Review*, 10(3), 510-522.
- Retnaningsih, H. (2020). Bantuan Sosial bagi Pekerja di Tengah Pandemi Covid-19: Sebuah Analisis terhadap Kebijakan Sosial Pemerintah. *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*.
- Ridha, M. R., Sinring, B., & Baharuddin, D. (2021). Pengaruh Bantuan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Usaha Mikro Kecil Menengah Terhadap Pengentasan Kemiskinan di Kota Parepare. *Economos: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 4(1), 75-81.
- Rizki, M. (2021). Dampak program perlindungan sosial dalam mengatasi kemiskinan di tengah pandemi Covid-19. *Jurnal Good Governance*.

- Samputra, P. L., & Ramadhani, A. W. (2019). Efektifitas Bantuan Sosial Dalam penanggulangan kemiskinan di Tengah Perlambatan Ekonomi Indonesia Dengan pendekatan Non-Parametrik. *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam (Darussalam Journal of Economic Perspec*, 5(1), 9-31.
- Sinaga, E., Lubis, T. A., Situmorang, E. A. O., & Harahap, A. S. (2022). Dampak Program Perlindungan Sosial terhadap Kemiskinan di Sumatra Utara. *Jurnal Manajemen Perbendaharaan*, 3(2), 116-131.
- Sumiyarti, S. (2022). Pengaruh Belanja Modal Dan Belanja Bantuan Sosial Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Kemiskinan. *Srikandi: Journal of Islamic Economics and Banking*, 28-43.
- Supit, B. F., & Lumingkewas, E. (2023). Implementasi Kebijakan Bantuan Sosial Tunai Di Kelurahan Talikuran Utara Kecamatan Kawangkoan Utara Minahasa. *Academy of Education Journal*, 14(2), 1059-1068.
- Susanto, E. R., Puspaningrum, A. S., & Neneng, N. (2021). Model Rekomendasi Penerima Bantuan Sosial Berdasarkan Data Kesejahteraan Rakyat. *Jurnal Tekno Kompak*, 15(1), 1-12.
- Susilawati, D., & Khairina, E. (2023). Strategi Pemerintah Dalam Mengatasi Kemiskinan Di Kota Batam. *Dialektika Publik*, 7(1), 19-28.
- Weriantoni, W., Yuliati, E., & Nasyrh, S. A. (2024). EFEKTIFITAS BANTUAN SOSIAL PKH DALAM MENGENTASKAN KEMISKINAN (STUDI KASUS DI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA). *Jurnal Darma Agung*, 32(2), 1103-1112.